

# Sinergitas Pemerintah Kota Malang Dalam Menghadapi Bonus Demografi

Vianey Ranughaor<sup>1\*</sup>, Cahyo Sasmito<sup>2</sup>, Willy Tri Hardianto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

## Abstract

*The demographic bonus is a phenomenon where the number of the productive age population (15-64 years) is greater than the non-productive age population. Indonesia is predicted to experience the peak of its demographic bonus during the period 2020-2030. Malang City, as one of the major cities in East Java, has unique opportunities and challenges in facing this phenomenon. This research aims to analyse the synergy of various work units in the Malang City Government in utilising the demographic bonus as a capital for sustainable development. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with key informants from various SKPDs in Malang City, while secondary data were obtained from official documents and related literature. The research results indicate that the Malang City Government has shown quite good synergy efforts through various cross-sectoral programs, but there are still some challenges in coordination and program implementation. The synergy that has been built encompasses aspects of education, health, economy, and information technology that are integrated into the city's long-term development vision.*

## Keywords:

*Demographic Bonus, Synergy, Malang City*

## Article History

Received 08 July 2025

Accepted 26 April 2026

## \*Corresponding Author:

[sandroahang@gmail.com](mailto:sandroahang@gmail.com)

## Pendahuluan

Bonus demografi merupakan kondisi demografis yang sangat strategis bagi sebuah negara atau daerah, di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). (Melo et al., 2024). Fenomena ini memberikan peluang emas bagi suatu wilayah untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, bonus demografi juga dapat menjadi bencana demografi jika tidak dikelola dengan baik dan tidak didukung oleh kebijakan yang tepat sasaran. (Sutikno, 2020)

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia sedang mengalami transisi demografi yang signifikan. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, Indonesia diprediksi akan mencapai puncak bonus demografi pada periode 2020-2030, di mana rasio ketergantungan penduduk mencapai titik terendah. Kondisi ini memberikan window of opportunity yang sangat berharga, namun juga menuntut kesiapan yang matang dari berbagai sektor pembangunan (Hidayah, 2023)

Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik demografis yang unik. Sebagai kota pendidikan dengan keberadaan berbagai perguruan tinggi terkemuka, Kota Malang memiliki dinamika demografis yang sangat menarik untuk dikaji. Populasi muda yang besar, baik dari penduduk asli maupun pendatang untuk menempuh pendidikan,

menciptakan potensi bonus demografi yang sangat strategis. Namun, pemanfaatan potensi ini memerlukan sinergitas yang kuat dari berbagai stakeholder, khususnya pemerintah daerah.

Sinergitas dalam konteks pemerintahan daerah mengacu pada keterpaduan dan kerjasama yang harmonis antara berbagai unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan. Dalam menghadapi bonus demografi, sinergitas menjadi kunci sukses karena fenomena ini mempengaruhi hampir seluruh aspek pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, hingga infrastruktur dan teknologi.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada urgensi untuk memahami bagaimana pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Malang, membangun sinergitas dalam menghadapi bonus demografi. Keberhasilan atau kegagalan dalam memanfaatkan bonus demografi akan berdampak jangka panjang terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam tentang pola sinergitas yang telah terbangun, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang dapat dikembangkan untuk optimalisasi pemanfaatan bonus demografi. Penelitian ini juga relevan dengan konteks pembangunan berkelanjutan yang menjadi paradigma global. Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi oleh Indonesia menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama. Bonus demografi, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi motor penggerak pencapaian berbagai target SDGs di tingkat lokal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memahami fenomena sinergitas Pemerintah Kota Malang dalam menghadapi bonus demografi. (Moleong, 2010) Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam tentang proses, makna, dan dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual sinergitas yang terbangun dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Lokasi penelitian adalah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemanfaatan bonus demografi. Pemilihan Kota Malang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik kota yang unik sebagai kota pendidikan dengan dinamika demografis yang menarik, serta posisinya sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Subjek penelitian terdiri dari key informan yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan posisi, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan terkait bonus demografi. Key informan meliputi pejabat di tingkat eselon II dan III dari berbagai SKPD, akademisi dari perguruan tinggi di Malang, representatif dari organisasi masyarakat sipil, dan pelaku usaha yang terlibat dalam program-program pemerintah kota.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, observasi yang merupakan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Kedua, wawancara terstruktur dengan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang telah disiapkan sebelumnya. Ketiga,

dokumentasi berupa catatan peristiwa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental yang terkait dengan fokus penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri (human instrument) yang berfungsi menetapkan fokus, memilih informan, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan, panduan wawancara untuk mengarahkan proses pencarian data; serta catatan lapangan yang menurut (Moleong, 2010) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dan dialami dalam rangka pengumpulan data.

Teknik analisis data mengacu pada model yang meliputi tiga tahap: reduksi data yang merupakan proses berpikir sensitif dalam merangkum dan memilih hal-hal pokok; penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang berupa temuan baru dalam bentuk deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. (Moleong, 2010) menegaskan bahwa triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dari berbagai pandangan. Selain itu, peneliti juga melakukan konfirmasi ulang terhadap data yang diperoleh dari informan untuk memastikan kredibilitasnya.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Profil Demografis Kota Malang**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang tahun 2023, jumlah penduduk Kota Malang mencapai 895.387 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 1,2% per tahun. Struktur usia penduduk menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15-64 tahun) mencapai 68,4% dari total populasi, sementara kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 22,1% dan kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) sebesar 9,5%. Komposisi ini menunjukkan bahwa Kota Malang sedang berada dalam fase bonus demografi dengan rasio ketergantungan sebesar 46,2%.

Karakteristik unik Kota Malang sebagai kota pendidikan tercermin dari keberadaan 63 perguruan tinggi dengan total mahasiswa mencapai 175.000 orang. Kondisi ini menciptakan dinamika demografis yang sangat menarik, di mana terdapat populasi muda temporer yang signifikan di samping penduduk asli. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Keberadaan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia memberikan warna tersendiri dalam struktur demografis kota kita. Mereka tidak hanya menjadi aset dalam hal kuantitas penduduk usia produktif, tetapi juga membawa dinamika intelektual dan kultural yang memperkaya kota.

Distribusi penduduk menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa 34,2% penduduk usia produktif memiliki pendidikan tinggi (diploma dan sarjana), 41,3% berpendidikan menengah, dan 24,5% berpendidikan dasar. Komposisi ini relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional dan memberikan potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyelaraskan kualitas sumber daya manusia dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Malang mencapai 67,8% dengan tingkat pengangguran sebesar 4,3%. Meskipun angka pengangguran relatif rendah, masih terdapat isu pengangguran terbuka pada kelompok pendidikan tinggi yang mencapai 6,8%. Kondisi ini

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, yang memerlukan intervensi kebijakan yang tepat.

### **Kebijakan dan Program Pemerintah Kota Malang**

Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi peluang dan tantangan bonus demografi melalui berbagai kebijakan dan program yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2028. Visi pembangunan kota yang ditetapkan adalah "*Malang Kota Pendidikan, Pariwisata, dan Perdagangan yang Maju, Mandiri, dan Berkarakter*" dengan salah satu misi utama adalah "*Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing global.*"

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang menyatakan, menyadari bahwa bonus demografi adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Oleh karena itu, fokus utama kami adalah peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Kami juga mengembangkan program-program yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja melalui kemitraan dengan berbagai stakeholder.

Program unggulan di bidang pendidikan mencakup pengembangan sekolah berbasis teknologi informasi, program magang dan prakerin yang diperluas, serta pengembangan kurikulum yang responsive terhadap kebutuhan industri 4.0. Untuk mendukung program ini, Pemerintah Kota Malang telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 23,5% dari total APBD, melampaui amanah konstitusi sebesar 20%. Di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Malang mengembangkan program "*Malang Sehat*" yang komprehensif, mencakup pelayanan kesehatan dasar, program pencegahan stunting, dan promosi kesehatan reproduksi remaja. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang menjelaskan, Investasi dalam kesehatan generasi muda adalah investasi jangka panjang. Kami fokus pada pencegahan dan promosi kesehatan untuk memastikan bahwa generasi muda kita memiliki produktivitas yang optimal.

Program ketenagakerjaan yang dikembangkan mencakup pelatihan keterampilan kerja, program kewirausahaan muda, dan job fair yang rutin diselenggarakan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Malang menyampaikan, bahwa dinas bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan link and match antara supply dan demand tenaga kerja. Program pelatihan keterampilan kami sesuaikan dengan kebutuhan industri lokal dan nasional.

### **Pola Sinergitas Antar SKPD**

Analisis terhadap pola sinergitas antar SKPD di Pemerintah Kota Malang menunjukkan adanya mekanisme koordinasi yang cukup terstruktur, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Mekanisme koordinasi utama dilakukan melalui rapat koordinasi bulanan yang dipimpin oleh Walikota atau Wakil Walikota, rapat koordinasi teknis antar SKPD, dan forum-forum koordinasi sektoral.

Sekretaris Daerah Kota Malang menjelaskan, bahwa menyadari bonus demografi tidak bisa dihadapi dengan pendekatan sektoral yang parsial. Oleh karena itu, kami membangun sistem koordinasi yang memungkinkan seluruh SKPD untuk bekerja secara sinergis. Setiap program yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia harus dikoordinasikan dengan baik agar tidak terjadi duplikasi dan untuk memastikan efektivitas implementasi.

Sinergitas yang terbangun dapat dilihat dari berbagai program lintas sektoral yang dikembangkan. Program "*Malang Pintar*" menggabungkan peran Dinas Pendidikan, Dinas

Komunikasi dan Informatika, dan Bappeda dalam mengembangkan sistem pendidikan berbasis teknologi. Program "Malang Kreatif" melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Tenaga Kerja dalam mengembangkan ekonomi kreatif sebagai sektor penyerap tenaga kerja muda. Namun, beberapa informan mengidentifikasi tantangan dalam koordinasi, terutama terkait dengan perbedaan prioritas antar SKPD dan keterbatasan sumber daya. Kepala Bappeda Kota Malang menyatakan, Koordinasi memang tidak selalu mudah. Setiap SKPD memiliki target dan prioritas masing-masing yang kadang tidak selaras. Kami terus berupaya memperkuat mekanisme koordinasi dan membangun pemahaman bersama tentang pentingnya sinergitas dalam menghadapi bonus demografi.

### **Peran Stakeholder Non-Pemerintah**

Sinergitas dalam menghadapi bonus demografi tidak hanya melibatkan SKPD dalam pemerintahan kota, tetapi juga stakeholder non-pemerintah yang memiliki peran strategis. Perguruan tinggi di Kota Malang berperan sebagai mitra dalam penelitian dan pengembangan kebijakan, penyedia sumber daya manusia berkualitas, dan motor penggerak inovasi.

Rektor Universitas Brawijaya, sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Malang, menyatakan, Kami memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam pembangunan kota. Melalui program pengabdian masyarakat dan kemitraan dengan pemerintah kota, kami berupaya mentransfer pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pemanfaatan bonus demografi.

Dunia usaha, khususnya sektor UMKM, juga memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja muda. Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Malang menjelaskan, bahwa mereka melihat bonus demografi sebagai peluang untuk mengembangkan bisnis dengan dukungan tenaga kerja yang berkualitas. Namun, kami juga membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal akses pembiayaan, pelatihan, dan kemudahan perizinan.

Organisasi masyarakat sipil berperan dalam monitoring dan evaluasi program pemerintah, serta advocacy untuk kebijakan yang pro-rakyat. Ketua Forum Komunikasi Pemuda Malang menyampaikan, bahwa mereka memberikan masukan kepada pemerintah kota tentang aspirasi dan kebutuhan generasi muda. Kami juga terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat yang mendukung pemanfaatan bonus demografi.

### **Tantangan dan Kendala**

Meskipun telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam membangun sinergitas, Pemerintah Kota Malang masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam menghadapi bonus demografi. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia yang kompeten. Meskipun komitmen pemerintah kota cukup tinggi, kebutuhan investasi untuk pemanfaatan bonus demografi yang optimal sangat besar.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang menjelaskan, Anggaran daerah yang terbatas menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan program-program yang ideal. Kami harus melakukan prioritas dan mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif, termasuk melalui kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga internasional.

Tantangan kedua adalah koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Beberapa program yang terkait dengan bonus demografi memerlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan

pemerintah pusat, yang tidak selalu mudah dilakukan. Perbedaan kebijakan dan prioritas antar tingkatan pemerintahan kadang menghambat implementasi program di tingkat kota.

Tantangan ketiga adalah perubahan teknologi yang sangat cepat yang memerlukan adaptasi berkelanjutan. Revolusi industri 4.0 dan transformasi digital mengubah landscape ketenagakerjaan dengan sangat cepat, sehingga program-program yang dikembangkan harus terus disesuaikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang menyatakan, Kami harus terus mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan bahwa sumber daya manusia kita memiliki literasi digital yang memadai.

Tantangan keempat adalah brain drain atau perpindahan tenaga kerja berkualitas ke kota-kota besar lainnya. Meskipun Kota Malang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, masih terdapat kecenderungan lulusan terbaik untuk bermigrasi ke Jakarta, Surabaya, atau kota-kota besar lainnya yang menawarkan peluang karier dan kompensasi yang lebih baik.

### **Strategi Optimalisasi**

Untuk mengatasi tantangan yang ada dan mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi, Pemerintah Kota Malang mengembangkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Strategi pertama adalah penguatan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan memasukkan aspek bonus demografi ke dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Strategi kedua adalah pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat untuk memastikan efektivitas program-program yang diimplementasikan. Kepala Inspektorat Kota Malang menjelaskan, mereka mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi yang memungkinkan tracking real-time terhadap progress implementasi program. Ini membantu kami untuk melakukan adjustment yang cepat jika diperlukan.

Strategi ketiga adalah penguatan kemitraan dengan berbagai stakeholder melalui pengembangan platform kolaborasi yang lebih sistematis. Pemerintah kota berencana membentuk forum multipihak yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk secara bersama-sama menghadapi bonus demografi.

Strategi keempat adalah pengembangan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi.

### **Sinergitas Pemerintah Kota Malang dalam Menghadapi Bonus Demografi**

#### **Konteks Bonus Demografi Kota Malang**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kota Malang berada dalam fase bonus demografi dengan rasio ketergantungan sebesar 46,2%, di mana kelompok usia produktif (15-64 tahun) mencapai 68,4% dari total populasi. Kondisi ini sejalan dengan (Setiawan, 2018) yang menyatakan bahwa bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. (Agustina et al., 2018) menegaskan bahwa window of opportunity ini memberikan peluang emas bagi pembangunan ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik.

Karakteristik unik Kota Malang sebagai kota pendidikan dengan 63 perguruan tinggi dan 175.000 mahasiswa menciptakan dinamika demografis yang kompleks. Hal ini mendukung konsep yang dikemukakan oleh (Hidayat et al., 2023) mengenai "creative class" yang menekankan

pentingnya konsentrasi individu berpendidikan tinggi dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan populasi muda temporer yang signifikan ini sejalan dengan teori human capital (Supraptika et al., 2025), yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan keterampilan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas ekonomi.

### **Pendekatan Sinergitas dalam Kebijakan Publik**

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengembangkan mekanisme koordinasi yang terstruktur melalui rapat koordinasi bulanan dan forum-forum koordinasi sektoral. Pendekatan ini sejalan dengan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh (Satibi et al., 2023), yang menekankan pentingnya koordinasi antar-aktor dalam mencapai tujuan bersama. (Latupeirissa et al., 2021) juga menegaskan bahwa collaborative governance memerlukan struktur formal dan informal yang memfasilitasi interaksi berkelanjutan antar-stakeholder.

Pengembangan program lintas sektoral seperti "Malang Pintar" dan "Malang Kreatif" menunjukkan penerapan konsep integrated governance (Tohopi et al., 2021). Program-program ini menggabungkan peran berbagai SKPD dalam mencapai tujuan yang sama, yang sejalan dengan prinsip whole-of-government approach yang ditekankan oleh OECD (2001) sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan kebijakan publik kontemporer.

### **Strategi Pemanfaatan Bonus Demografi**

Fokus pemerintah kota pada peningkatan kualitas pendidikan dengan alokasi anggaran 23,5% dari APBD menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan human capital. Strategi ini sejalan dengan temuan (Satyahadewi et al., 2023) yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat untuk mengoptimalkan manfaat bonus demografi. (Qomariyah et al., 2023) dalam teori human capital investment juga menekankan bahwa investasi dalam pendidikan menghasilkan return yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Program "Malang Sehat" yang komprehensif mencakup pencegahan stunting dan promosi kesehatan reproduksi remaja sejalan dengan rekomendasi (Nasional 2019) yang menekankan pentingnya investasi dalam kesehatan reproduksi dan maternal untuk memaksimalkan dividend demografi. Kesehatan yang baik merupakan komponen krusial dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

### **Peran Stakeholder Non-Pemerintah**

Keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam penelitian dan pengembangan kebijakan menunjukkan penerapan konsep triple helix (Masitoh et al., 2021) Model ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan industri dalam mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan di mana pengetahuan menjadi faktor produksi utama. Partisipasi dunia usaha, khususnya sektor UMKM, dalam penyerapan tenaga kerja muda mencerminkan pentingnya kemitraan publik-swasta dalam menghadapi bonus demografi. Kolaborasi antar-sektor dapat menghasilkan outcomes yang tidak dapat dicapai oleh satu sektor secara sendiri.

### **Tantangan dalam Implementasi Sinergitas**

Tantangan keterbatasan sumber daya yang dihadapi Pemerintah Kota Malang sejalan dengan temuan (Yaumidin, 2013) yang menyatakan bahwa koordinasi antar-organisasi seringkali terhambat oleh keterbatasan resources dan perbedaan prioritas, fragmentasi struktural dan cultural dapat menghambat efektivitas koordinasi dalam pemerintahan. Masalah brain drain yang dialami kota bahwa mobilitas tenaga kerja berkualitas tinggi dapat mengurangi manfaat bonus demografi bagi daerah asal. Hal ini menekankan pentingnya pengembangan strategi retention dan attraction untuk mempertahankan human capital berkualitas di tingkat lokal.

### **Kerangka Teoritis Integrated Governance**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah menerapkan prinsip-prinsip integrated governance meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Hal ini sejalan dengan model integrated governance (Haq et al., 2025) yang mencakup empat dimensi: structural integration, cultural integration, procedural integration, dan strategic integration. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang direncanakan mencerminkan penerapan konsep digital governance. Pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas koordinasi dan transparansi dalam implementasi kebijakan.

### **Implikasi untuk Pembangunan Berkelanjutan**

Strategi komprehensif yang dikembangkan Pemerintah Kota Malang menunjukkan pemahaman yang baik terhadap kompleksitas bonus demografi. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pembangunan.

Pengembangan platform kolaborasi multipihak yang direncanakan mencerminkan penerapan prinsip participatory governance. Pendekatan ini dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan publik melalui pelibatan berbagai stakeholder dalam proses pengambilan keputusan.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah mengembangkan pendekatan sinergitas yang cukup baik dalam menghadapi bonus demografi, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi akan sangat bergantung pada kemampuan untuk memperkuat koordinasi antar-SKPD, mengoptimalkan peran stakeholder non-pemerintah, dan mengembangkan inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori collaborative governance dalam konteks pemanfaatan bonus demografi di tingkat lokal.

### **Daftar Pustaka**

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec, 4(2)*, 265–283.
- Haq, A. S., Samudra, A. A., & Satispi, E. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria

- Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *Sospol*, 11(2), 175–191.
- Hidayah, R. (2023). *Peran Geografi dalam Pembentukan Karakter Generasi Emas*. Penerbit P4I.
- Hidayat, N., Sutrisno, S., & Permatasari, T. (2023). Transformasi Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda menjadi Institut Agama Buddha Nalanda: Tinjauan Studi Kelayakan dalam Konteks Sosial Budaya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4174–4189.
- Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika pelaksanaan kebijakan otonomi khusus kepada daerah Papua dan Papua Barat dengan perspektif kebijakan publik. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 168–178.
- Masitoh, S., Miftah, H., Yoesdiarti, A., & Novita, I. (2021). Implementasi mbkm (merdeka belajar kampus merdeka) menurut perspektif mahasiswa agribisnis. *Jurnal Agribisains*, 7(2), 59–67.
- Melo, R. H., Lasulika, C., & Saleh, S. E. (2024). Optimalisasi Bonus Demografi Melalui Kebijakan Kependudukan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi*, 3(2), 143–148.
- Moleong, J. (2010). *Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasional, B. P. P., & Nasional, B. P. P. (2019). *Transisi Demografi dan Epidemiologi: Permintaan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*. Direktorat Kesehatan Dan Gizi Masyarakat, Jakarta.
- Qomariyah, N., Ningtyas, J. D. A., Tamara, K., & Ismanto, K. (2023). Analisis Peluang dan Tantangan Adanya Bonus Demografi Ditahun 2045 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 180–186.
- Satibi, I., Ediyanto, E., & Vaugan, R. (2023). Konstruksi konsep sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (studi di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 33–46.
- Satyahadewi, N., Amir, A., & Hendrianto, E. (2023). Proyeksi Peningkatan Perekonomian melalui Pemanfaatan Bonus Demografi 2040. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 715–725.
- Setiawan, S. A. (2018). Mengoptimalkan bonus demografi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2).
- Supraptika, H., Faturohman, M. R. T., Syavera, A. F., Giovaningrum, P., & Fahmi, A. D. (2025). Application Of Human Capital Management To Improve Hr Quality And Company Performance Through Theory. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(1), 309–314.
- Sutikno, A. N. (2020). Bonus demografi di indonesia. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 421–439.
- Tohopi, R., Nani, Y. N., & Aneta, Y. (2021). Model Perumusan Kebijakan “Public Mechanism Approach” Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 141–154.
- Yaumidin, U. K. (2013). Kewirausahaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tantangan Sinergi Multi-Sektor Dan Multi-Dimensi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(1).